

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Peristiwa terorisme pada tahun 2002 di Bali dikenal dengan Bom Bali I, mengakibatkan banyak korban jiwa baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, korban jiwa paling banyak adalah warga negara Australia . Sehingga menyebabkan penerbitan kebijakan luar negeri *Travel Warning* oleh Australia terhadap Indonesia. *Travel Warning* adalah sebuah kebijakan pelarangan melakukan perjalanan bagi warga negara Australia ke Indonesia, kebijakan tersebut jelas untuk meningkatkan keamanan atau kewaspadaan negara Australia dari tindak terorisme yang terjadi di Indonesia.

Namun kebijakan dan peristiwa Bom Bali I tersebut tidak menurunkan animo warga negara Australia untuk tetap mengunjungi Indonesia khususnya Bali, dikarenakan beberapa faktor yaitu: pertama, warga negara Australia merasa nyaman tinggal di Bali hingga tiga bulan bahkan lebih. Kedua, jarak tempuh yang dekat antara Bali dan Australia, sekitar 3-7 jam perjalanan melalui udara. Ketiga, warga negara Australia menganggap Bali sebagai rumah kedua bagi mereka karena keunikan Pulau Bali ataupun hanya untuk berlibur.

Kebijakan luar negeri yang dikeluarkan Australia menjadi salah satu yang mempengaruhi dinamika hubungan Australia dengan Indonesia. Selain itu beberapa peristiwa lain menjadi tolak ukur hubungan kedua negara pada masa pemerintahan PM Howard, seperti kasus Timor-Timur(1975-1999) ketika Pemerintah Australia diberi mandat oleh PBB untuk menjadi penengah antara Timor-Timur dengan Indonesia. Hal tersebut menaruh kecurigaan Indonesia terhadap Australia dikarenakan Indonesia menilai Australia berada dipihak Timor-Timor yang menginginkan lepas dari Indonesia atau Timor-Timur ingin membentuk negara sendiri. Kasus

Timor-Timur ini membuat hubungan Australia dan Indonesia menjadi renggang. Setelah kasus tersebut, pada 12 Oktober 2002 terjadi peristiwa terorisme di Bali, Indonesia yang menewaskan 202 orang, 88 orang diantaranya adalah warga negara Australia. Peristiwa terorisme ini serta penerbitan kebijakan *Travel Warning* semakin merenggangkan hubungan Australia dengan Indonesia.

Hubungan bilateral tersebut kembali membaik setelah kedua negara ini melakukan kerja sama dalam investigasi terkait Bom Bali I dan bekerja sama dalam memberantas terorisme. Selain itu beberapa kerja sama dalam bidang pertahanan seperti *Aviation Security Capacity Building Project* yang ditandatangani bulan Maret 2005. kerja sama tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah masuknya teroris.

Selain melihat beberapa peristiwa penting yang dialami dua negara ini, juga melihat masa Pemerintahan Australia yang dipimpin oleh PM Howard sebagai perdana menteri. Pada masa pemerintahannya, PM Howard dikenal memiliki sifat yang kaku dan arogan serta konservatif yang sering menjadi kendala bagi pelaksanaan politik luar negeri Australia. Khususnya dalam menjalin hubungan dengan Asia termasuk Indonesia. Pemerintahan PM Howard lebih mementingkan hubungan Australia dengan negara sekutu yaitu Amerika Serikat serta hubungan dengan negara leluhurnya yaitu Inggris.

Kebijakan luar negeri yang dibuat oleh PM Howard dipengaruhi salah satunya karena berasal dari Partai Koalisi Liberal, biasanya pemerintahan dalam koalisi Liberal berpijak pada kedekatannya dengan AS dan menomorduakan negara-negara di Asia Tenggara.

Kebijakan luar negeri PM Howard merupakan campuran dari ideologi, latar belakang, penilaian dan prasangka serta perubahan ancaman yang keras dan konservatif. Kebijakan *Travel Warning* yang dibuat PM Howard terhadap Indonesia tersebut menunjukkan kurang kooperatif,

sehingga menimbulkan masalah yang menyebabkan hubungan keduanya mengalami penurunan. Gaya kepemimpinan, persepsi dan cara pandang PM Howard merupakan hasil pemikiran dari Partai koalisi Liberal. Hal tersebut menjadi pengaruh pada pembuatan kebijakan *Travel Warning* terhadap Indonesia. PM Howard memiliki persepsi ancaman atau rasa terancam dalam merespon peristiwa terorisme yang terjadi di Bali. Meskipun peristiwanya telah berlalu dan kondisi keamanan Indonesia kembali aman dan beberapa upaya telah dilakukan Indonesia dalam memberantas terorisme, seperti menghukum mati para terorisme dan peningkatan keamanan di lalu lintas alat transportasi.

Ada enam variabel yang dapat menjelaskan persepsi ancaman PM Howard, ketika mengoperasionalkan teori Stein yaitu : pertama, penjelasan non psikologi terkait persepsi ancaman yang merupakan perspektif pemimpin dalam melihat potensi ancaman dari luar negaranya. Pemimpin memahami suatu ancaman dan memutuskan mengambil tindakan, jadi kebijakan yang diambil PM Howard merupakan reaksi dari peristiwa terorisme. Dengan terjadinya peristiwa terorisme di Bali tahun 2002 menjadi pertanda untuk PM Howard bahwa Indonesia tidak aman untuk dikunjungi oleh warga negara Australia. Kompleksitas birokrasi menyebabkan informasi tentang terorisme merupakan suatu ancaman, terkendala oleh permasalahan waktu dan pengkoordinasian penilaian dan tindakan yang diambil terhadap persepsi ancaman tersebut.

Sosial budaya juga merupakan hal yang membentuk persepsi ancaman, dengan kata lain sosial budaya Australia didefinisikan sebagai tradisi dan nilai-nilai yang ditanamkan oleh PM Howard untuk mempengaruhi perilaku warga negara Australia. Serta norma internasional yang dilanggar karena adanya pembentukan gerakan-gerakan anarkis dan radikal di Indonesia. Hal tersebut meningkatkan persepsi ancaman PM Howard tentang Indonesia.

Kedua, psikologi PM Howard mempengaruhi persepsi ancaman dalam pengambilan keputusan. di mana cara pandang, karakteristik, nilai atau ideologi yang melekat dalam pikiran PM Howard dapat mempengaruhi pandangannya terhadap peristiwa terorisme Bom Bali I. PM Howard memiliki keinginan menjadikan Australia yang ideal seperti tahun 1950-an karena PM Howard sangat konservatif terhadap nilai-nilai Australia.

Ketiga, bias pemikiran dan heuristik dalam merumuskan kebijakan *Travel Warning* merupakan reaksi PM Howard dalam mengantisipasi masa depan Australia yang terancam oleh terorisme. Kebijakan tersebut merupakan strategi pertahanan untuk keamanan nasional Australia dari ancaman terorisme.

Keempat, berkurangnya antipati, pemingkiaan, dan kecenderungan terhadap resiko, PM Howard mempersepsikan suatu ancaman berdasarkan faktor resiko. Ancaman terorisme yang terjadi di Indonesia dinilai PM Howard dapat mengancam atau membahayakan kedaulatan Australia dan keselamatan warga negara Australia. Dengan alasan tersebut PM Howard menerbitkan kebijakan *Travel Warning* ke Indonesia demi keselamatan warga negaranya. Hal tersebut menjadi sesuatu yang berharga bagi Australia.

Kelima, faktor emosi yang dapat meningkatkan persepsi ancaman adalah ketakutan. Menunjukkan bahwa Kebijakan *Travel Warning* tersebut, PM Howard masih merasa takut meskipun keadaan Indonesia sudah kembali kondusif bahkan ketika Australia telah melakukan kerja sama diberbagai bidang seperti *Counter terrorism* dan kerja sama di bidang pertahanan, namun PM Howard tetap menerbitkan kebijakan *Travel Warning* ke Indonesia dan tidak menurunkan level bepergian ke Indonesia.

Keenam, emosi setiap individu-individu menjadi emosi yang kolektif. Emosi individu ini menjadi emosi yang bersifat nasional, atau emosi sebuah bangsa. Seperti, pidato-pidato atau

pernyataan PM Howard ataupun menteri luar negeri Australia yang mengatakan bahwa terorisme sangat kejam dan brutal serta pembunuh massal bagi orang-orang yang tidak bersalah khususnya warga negara Australia dan beberapa pernyataan lain terkait kekejaman dari peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia.

Keenam variabel di atas dan pengambilan kebijakan dalam level individu menjelaskan bahwa kebijakan *Travel Warning* yang diterbitkan oleh PM Howard dikarenakan adanya persepsi ancaman secara individual terhadap ancaman dari peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia dari tahun 2002-2005. Sikap PM Howard yang kaku dan arogan terbawa dalam gaya kepemimpinannya dan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Australia. Sehingga, persepsi ancaman PM Howard yang dilatarbelakangi oleh peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia tersebut dipengaruhi oleh psikologi, rasionalitas, karakteristik, sosial budaya, faktor resiko dan emosi dalam penilaian yang terbentuk oleh cara hidup PM Howard, baik dari lingkungan keluarga ataupun pengaruh dari partai Koalisi Liberal serta cara pandangya terhadap Indonesia yang menjadi landasan PM Howard selama memerintah sebagai Perdana Menteri Australia. Dimana Howard adalah seorang yang memilih kedekatan dengan AS dan Inggris, sehingga hal tersebut berdampak pada kebijakan luar negeri yaitu kebijakan *Travel Warning* terhadap Indonesia. Dikarenakan dalam proses pembuatan kebijakan pada masa PM Howard dan juga pengaruh dari pandangan Partai Koalisi Liberal sangat dominan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan tersebut.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian rumusan kesimpulan di atas sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian, maka peneliti merumuskan rekomendasi yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan, masukan, dan saran. Kepada peneliti selanjutnya. Bagi peneliti selanjutnya yang

akan meneliti dengan tema yang sama diharapkan bisa lebih baik lagi. Informasi yang diperlukan diharapkan dapat diperoleh dengan lebih lengkap serta ditunjang dengan buku-buku referensi yang lebih banyak. Para peneliti selanjutnya untuk berhati-hati dalam penggunaan konsep karena berkaitan dengan kajian psikologis.

